

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **I.1. LATAR BELAKANG**

Keputusan yang diambil pemerintah memiliki dampak luas bagi sektor swasta. Pemerintah dan institusi sosial menciptakan seluruh kerangka dimana transaksi ekonomi sektor swasta dimungkinkan terwujud. Jika misalnya pemerintah mengubah tingkat bunga pinjaman maka tentu punya pengaruh terhadap biaya yang dikeluarkan oleh sektor swasta, serta perkembangan sektor swasta itu sendiri.

Dalam mewujudkan kemandirian pemerintah daerah berupaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, berkaitan dengan pertumbuhan barang dan jasa. Pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu keberhasilan perkembangan suatu perekonomian. Ini juga merupakan masalah makroekonomi dalam jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi sebagai proses kenaikan banyaknya produksi perekonomian dalam pendapatan nasional. Pertumbuhan Ekonomi dinilai dengan membandingkan Gross National Product (GNP) yang sedang berjalan dengan GNP tahun sebelumnya.

Pemerintah daerah diharapkan mampu menggali sumber-sumber keuangan lokal, khususnya melalui Pendapatan Asli. Pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pada pasal 3, disebutkan bahwa PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi. Semakin besarnya sumbangan PAD kepada APBD maka akan menunjukkan semakin kecil ketergantungan daerah kepada pusat sebagai konsekuensi pelaksanaan otonomi daerah dari prinsip secara nyata dan bertanggung jawab.

Pendapatan Asli Daerah idealnya menjadi sumber utama pendapatan lokal. Sumber pendapatan lain relatif fluktuatif dan cenderung diluar kontrol (kewenangan) pemerintah daerah. Peningkatan PAD sebenarnya merupakan eksekusi dari pertumbuhan ekonomi. Daerah yang pertumbuhan ekonominya positif mempunyai kemungkinan mendapatkan kenaikan PAD. Dari perspektif ini seharusnya pemda lebih berkonsentrasi pada pemberdayaan kekuatan ekonomi lokal untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi daripada sekedar mengeluarkan produk perundangan terkait dengan pajak ataupun retribusi. Kemampuan keuangan suatu daerah dapat dilihat dari besar kecilnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diperoleh daerah yang bersangkutan. Dalam kaitannya dengan pemberian otonomi daerah yang lebih besar kepada daerah. PAD selalu dipandang sebagai salah satu indikator atau kriteria untuk mengukur ketergantungan suatu daerah kepada pusat. Pada prinsipnya semakin besar sumbangan PAD kepada APBD maka akan menunjukkan semakin kecil ketergantungan daerah kepada pusat sebagai konsekuensi pelaksanaan otonomi daerah dari prinsip secara nyata dan bertanggung jawab.

Kemandirian keuangan daerah merupakan prasyarat penting dalam pelaksanaan otonomi daerah melalui desentralisasinya. Suatu daerah dikatakan mampu untuk melaksanakan otonomi daerah salah satu cirinya terletak pada kemandirian keuangan daerah. Dengan kata lain daerah otonom harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan sendiri, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri yang cukup memadai untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah

daerah. Kemandirian keuangan suatu daerah harus mampu mengatur dan mengelola segala bentuk penerimaan dan pembiayaannya tanpa harus tergantung pemerintah pusat (Haris,2005). Kebijakan desentralisasi ditujukan untuk mewujudkan kemandirian daerah. Pemerintah daerah otonomi mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasar aspirasi masyarakat (UU No. 32 tahun 2004). Mengemukakan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat dipandang sebagai salah satu indikator atau kriteria untuk mengukur tingkat ketergantungan suatu daerah kepada pemerintah daerah. Pada prinsipnya, semakin besar sumbangan PAD kepada APBD akan menunjukkan semakin kecilnya tingkat ketergantungan daerah kepada pemerintah daerah.

#### **Tabel Fenomena**

#### **Laporan Keuangan Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Terhadap Kemandirian Keuangan**

Kabupaten /Kota	Tahun	Gross National Product Rp (000)	Pendapatan Asli Daerah Rp (000)	Dana Perimbangan Rp (000)
Medan	2014	1,681,948,783	70,892,590	525,798,998
	2015	1,355,644,466	82,840,434	611,301,799
	2016	1,900,853,852	95,726,168	599,493,519
Labuhan Batu	2014	641,297,034	109,896,912	641,297,043
	2015	707,284,674	101,023,216	707,284,674
	2016	1,005,470,238	125,925,267	1,005,470,238

**Sumber:**Badan Pusat Statistik Sumatera Utara, 2017

Berdasarkan Tabel I.1 menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah, terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini dapat dilihat dari laporan keuangan yang tidak sejalan.

Pada tahun 2014 di Kota Medan GNP sebesar Rp 1,681,948,783 mengalami penurunan pada tahun 2015 menjadi sebesar Rp1,355,644,466 tetapi jumlah dana perimbangan tahun 2014 sebesar Rp 525,798,998 justru mengalami kenaikan pada tahun 2015 menjadi sebesar Rp 611,301,799

Pada tahun 2014 di Kabupaten Labuhan Batu pendapatan asli daerah sebesar Rp109,896,912 mengalami penurunan pada tahun 2015 sebesar Rp 101,023,216 tetapi jumlah dana pertimbangan pada tahun 2014 sebesar Rp 641,297,034 justru mengalami kenaikan pada tahun 2015 sebesar Rp 707,284,674

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan sebelumnya maka peneliti tertarik untuk mengangkat judul“**Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kemandiriian Keuangan Daerah Pada Kabupaten/kota di Sumatera Utara periode 2014-2017**”.

#### **I.2 RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan uraian diatas, maka permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaruh PAD terhadap APBD pada pemerintahan kabupaten/kota di Sumatera Utara ?
2. Bagaimana dampak pertumbuhan ekonomi dalam kemandirian daerah pada pemerintahan kabupaten/kota di Sumatera Utara ?
3. Apakah pemerintahan kabupaten/kota di Sumatera Utara sudah mampu mengendalikan kemandirian keuangannya?

### **PERTUMBUHAN EKONOMI**

Menurut Sadono Sukirno, SE. M. S. Sc (2013) pertumbuhan ekonomi adalah perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat dan kemakmuran masyarakat meningkat.

Menurut Sirojuzilam dan Mahalli (2010) pertumbuhan ekonomi adalah untuk mengukur prestasi dari perkembangan suatu perekonomian dari suatu periode ke periode berikutnya.

### **PENDAPATAN ASLI DAERAH**

Menurut Rahardjo Adisasmita (2011:120) karena keterbatasan kemampuan daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah mengingat sumber-sumbernya juga terbatas, maka salah satu sumber penerimaan daerah yang lain dapat menunjang dan saling berkaitan dengan pendapatan asli daerah adalah pinjaman daerah.

Aries Djaenuri, M.A. (2012) menemukan bahwa pendapatan asli daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayah sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut Abdul Halim (2014) sumber pendapatan asli daerah terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah ( Pasal 6 ayat 1 ).

Pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pada pasal 3, disebutkan bahwa PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi.

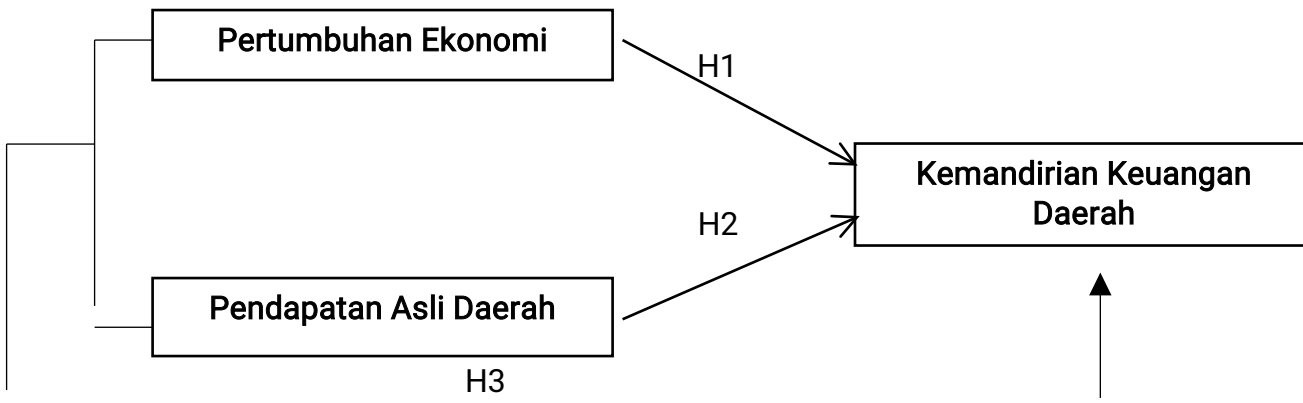
### **KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH**

Menurut Yani (2009), keuangan daerah merupakan semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.

Menurut W. Gerald Cole dalam Zaki Baridwan (2009) adalah suatu kerangka dari prosedur – prosedur yang saling berhubungan yang disusun sesuai dengan suatu skema yang menyeluruh, untuk melaksanakan suatu kegiatan atau fungsi utama dari suatu organisasi, dalam penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan di daerah adalah system atau cara pengelolaan keuangan daerah secara berdayaguna dan berhasilguna. Hal tersebut diharapkan agar sesuai dengan aspirasi pembangunan dan

tuntutan masyarakat yang semakin berkembang akhir – akhir ini .

### 1.3.KERANGKA KONSEPTUAL



### 1.4.HIPOTESIS PENELITIAN

Hipotesis merupakan dugaan yang masih bersifat sementara dan harus di uji kebenarannya melalui penelitian. Dalam penelitian ini dapat dikemukakan hipotesis sebagai berikut :

H1 : Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh terhadap Kemandirian Keuangan Daerah pada Kabupaten/Kota Sumatera Utara Tahun 2104-2016

H2 : Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Kemandirian Keuangan Daerah pada Kabupaten/Kota Sumatera Utara Tahun 2104-2016

H3 : Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Kemandirian Keuangan Daerah pada Kabupaten/Kota Sumatera Utara Tahun 2104-2016